

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan ekonomi, sektor industri merupakan *leading sector* yang akan mendorong sektor-sektor lainnya untuk berkembang. Pembangunan industri diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah, terutama yang berbasis sumber daya lokal dan bersifat intensif tenaga kerja (Adrimas, 2008). Dalam proses pembangunan itu, akan terjadi perubahan struktur ekonomi dari ekonomi tradisional yang didominasi sektor pertanian menuju sektor ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri sebagai penggerak dalam pembangunan. Sektor industri mengolah sumber daya alam menjadi produk yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Sehingga dengan semakin berkembangnya sektor industri, total nilai tambah yang dihasilkan menjadi lebih besar. Hal inilah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Berkembangnya sektor industri juga diharapkan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian berimplikasi adanya kewajiban Pemerintah untuk mempunyai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Sedangkan untuk Pemerintah Propinsi mempunyai kewajiban membuat dokumen Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 3/2014 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. Sebelumnya kebijakan di sektor industri ini telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Visi pembangunan Industri Nasional sesuai Perpres Nomor 28/2008 tersebut adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025. Sedangkan strategi yang perlu dilakukan adalah agar setiap Propinsi mempunyai Industri Unggulan/Prioritas Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kajian Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten/Kota. Pendekatan pembangunan sektor industri juga diperkuat dengan Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Dalam penyusunan RPIK terdapat lima program yang harus dimiliki, salah satunya adalah penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan propinsi, kabupaten/kota.

Sektor industri di Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh industri kecil menengah (IKM). Berdasarkan data, sebesar 99,92 persen industri merupakan industri kecil menengah (BPS Sumatera Barat, 2016). Kontribusi IKM dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 161.793 orang, yaitu 86,64 persen dari total tenaga kerja sektor industri. Kota Padang (18,56%), Kabupaten Agam (13,96%) dan Kabupaten Lima Puluh Kota (10,54%) merupakan Kabupaten/Kota dengan penyerapan tenaga kerja sektor industri terbesar. Kabupaten/Kota dengan jumlah usaha industri terbanyak adalah Kabupaten Agam (16,75%), Kabupaten Lima Puluh Kota (14,58%) dan Kota Padang (11,33%). Berdasarkan kontribusi IKM pada PDRB, Kota Padang memberikan kontribusi terbesar yaitu 36,37%, kemudian Kabupaten Pasaman Barat (9,95%) dan Kabupaten Agam (9,39%). Sedangkan Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mampu memberikan kontribusi pada PDRB Sumatera Barat sebesar 4,85%.

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah dengan jumlah usaha dan penyerapan tenaga kerja industri yang termasuk paling besar, ternyata memberikan kontribusi yang lebih kecil pada PDRB Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri di Kab. Lima Puluh Kota mempunyai potensi, namun skala usaha masih didominasi oleh industri kecil dengan produktifitas tenaga kerja yang masih rendah. Menurut data BPS, jumlah tenaga kerja pada sektor industri di Kab. Lima Puluh Kota menunjukkan penurunan yang cukup besar. Pada tahun 2011 sebesar 15,4%, turun menjadi 8,7% pada tahun 2016. Penurunan juga terjadi pada jumlah unit usaha industri, sebanyak 9143 unit usaha (2011) turun sebesar 11% menjadi 8.244 unit usaha pada tahun 2016 (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota, 2016).

Ditinjau dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2011-2016 juga mengalami sedikit penurunan dari 8,47% pada tahun 2011 menjadi 8,21% pada tahun 2016. Secara rata-rata turun sebesar 0,13%, namun kontribusi sektor

industri berada di atas rata-rata kontribusi sektoral. Laju pertumbuhan industri menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 7,67% dan terendah pada tahun 2015 sebesar 1,81%. Laju pertumbuhan sektor industri rata-rata tahun 2011-2016 adalah 5,15%, berada dibawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sektoral.

Salah satu komoditas industri Kab. Lima Puluh Kota yang menjadi komoditi ekspor adalah gambir olahan. Pada tahun 2012, Provinsi Sumatera Barat merupakan pemasok gambir terbesar di Indonesia yaitu sebesar 91,74 persen. Sebesar 54,45 persen gambir Provinsi Sumatera Barat ini, berasal dari Kab. Lima Puluh Kota. Sehingga, secara keseluruhan sebesar 49,95 persen ekspor gambir Indonesia berasal dari Kab. Lima Puluh Kota (Amri, 2015). Data ini menunjukkan bahwa Kab. Lima Puluh Kota merupakan pemasok gambir olahan terbesar di Indonesia. Dengan besarnya potensi industri pengolahan gambir ini, ternyata belum mampu memberikan kontribusi yang besar pula pada sektor industri di Kab. Lima Puluh Kota.

Berdasarkan uraian tersebut, perencanaan industri di Kab. Lima Puluh Kota perlu dilakukan melalui penentuan industri unggulan yang dapat mendorong perkembangan industri dan sektor ekonomi lainnya. Hal ini juga sesuai dengan program pembangunan industri dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Berdasarkan skala usaha, industri di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan industri kecil menengah (IKM). Sehingga, judul dari penelitian ini adalah **Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota**. Dengan penelitian ini diharapkan akan dihasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat yang dapat mempercepat pengembangan industri kecil menengah pada khususnya, dan perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya.

B. Perumusan Masalah

Laju pertumbuhan industri cukup berfluktuasi dalam enam tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan sektor industri 2011-2016 adalah sebesar 5.15%, berada dibawah rata-rata pertumbuhan sektoral sebesar 5.96%. Dari sisi kontribusi sektoral, mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan -0.13% tahun 2011-2016. Kemudian terjadi penurunan pada jumlah unit usaha dan kontribusi tenaga

kerja di sektor industri. Sebagai pedoman dalam pembangunan sektor industri didasarkan pada UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Menurut UU ini, Pemerintah Daerah perlu menentukan kelompok industri yang menjadi unggulan daerah agar pembangunan sektor industri terarah dan konsisten serta dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Kemudian sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010-2015, tujuan pembangunan terkait dengan industri secara umum adalah terwujudnya peningkatan pengembangan industri agraris yang efisien dan berdaya saing tinggi. Kemudian dalam RPJMD 2016-2021, revitalisasi pertanian menuju agroindustri merupakan salah satu agenda prioritas sebagai penjabaran misi Kepala Daerah. Sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan sektor industri ini, diperlukan strategi pengembangan yang sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi daerah.

Dilatar belakangi oleh kondisi dan beberapa permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, dapat kita rumuskan pokok permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan industri kecil menengah (IKM) di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2011-2016?
2. Faktor-faktor apakah yang menentukan pertumbuhan IKM di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011-2016?
3. Apakah IKM unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota?
4. Apakah strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan IKM di Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perkembangan IKM di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2011-2016.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan IKM di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menganalisis IKM unggulan yang akan dikembangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Menganalisis strategi untuk pengembangan IKM di Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Teori.

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

2. Kontribusi Metodologi.

Untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan menambah khasanah ilmu berkenaan dengan analisis IKM unggulan, produk unggulan daerah, strategi dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan IKM.

3. Bagi Pengambil Kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan perencanaan pembangunan sektor industri dan mengambil kebijakan untuk pengembangan IKM dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan perencanaan sektoral regional dengan ruang lingkup kajian adalah menganalisis perkembangan industri kecil menengah (IKM) di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011-2016. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan IKM, menemukan IKM unggulan yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah, dan merumuskan strategi pengembangannya. Kategori industri yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota hingga saat ini adalah IKM. IKM ini mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan industri besar sehingga fokus dalam penelitian ini adalah pada industri kecil menengah. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data tahun 2011-2016.

F. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan penelitian agar memudahkan dalam memahami tulisan ini: Bab I Pendahuluan, pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika dalam penulisan. Kemudian Bab II Tinjauan Pustaka, yang memaparkan tentang konsep dan teori terkait yang digunakan dalam penelitian, studi literatur tentang perencanaan industri, hasil kajian penelitian terdahulu sebagai acuan dan pembanding dengan penelitian yang dilakukan penulis, kemudian kerangka analisis penelitian. Selanjutnya Bab III Metode Penelitian, menjelaskan jenis data dan sumber data yang digunakan, metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian kemudian defenisi operasional variabel. Kemudian Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian, merupakan uraian tentang kondisi daerah penelitian yang meliputi aspek fisik wilayah, aspek kesejahteraan sosial dan aspek perekonomian daerah. Selanjutnya Bab V Hasil dan Pembahasan, merupakan penjelasan terhadap hasil yang ditemukan dalam penelitian. Kemudian hasil penelitian ini akan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan perencanaan IKM terhadap Pemerintah Daerah. Kemudian Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan yang merangkum hasil penelitian disertai saran dan rekomendasi penulis terhadap Pemerintah Daerah dalam perencanaan IKM ini.

